

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Oleh karena posisinya yang sangat strategis Selat Malaka dalam lalu lintas perdagangan di mana muatan dalam kapal-kapal yang melintasinya membawa barang-barang dengan nilai properti yang besar, kedua selat tersebut banyak dijadikan aksi kejahatan terhadap kapal-kapal laut (*piracy*) yang ingin mengambil manfaat / keuntungan dari kapal-kapal tersebut. Kejahatan perompakan (*piracy*) ini termasuk aksi kejahatan tertua yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya aksi kejahatan (*piracy / armed robbery*) di laut ini, antara lain: Situasi ekonomi di kawasan sekitar, lemahnya kontrol pemerintah terhadap permasalahan di dalam negeri, lemahnya sistem hukum di bidang maritim, kondisi geografis.
2. Dalam skema kerjasama dilakukan baik secara bilateral dan multilateral yakni: adanya patroli terkoordinasi, Singapura, Indonesia dan Malaysia telah melakukan patroli terkoordinasi secara teratur di Selat Malaka untuk meningkatkan pengamanan di jalur transportasi laut terpadat di dunia itu. Dalam pelaksanaannya, inisiatif-inisiatif diatas masih memiliki banyak kelemahan, seperti kurangnya kepekaan kerjasama antara pasukan Angkatan Laut dari negara-negara tetangga, dan kurangnya pengaturan yang diadakan atas kerjasama baik antara negara-negara tetangga, negara pesisir dan negara pengguna. Dengan prinsip non-intervensi, negara-negara pesisir hanya akan terjebak pada mekanisme mengurus urusan masing-masing dengan cara yang kolektif. Harus diingat bahwa batas wilayah adalah topik yang sensitif bagi negara-negara pesisir karena persaingan klaim atas sumber daya lepas pantai dan

kekhawatiran atas kekuatan eksternal di wilayah tersebut. Hal ini mempengaruhi respon negara pesisir terhadap ancaman-ancaman di Selat Malaka, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa mereka membatasi diri untuk melakukan patroli pengamanan hanya dalam yurisdiksi teritorial mereka sendiri. Sebagai contoh, dalam prinsip pengejaran (*hot pursuit*), patroli dapat memasuki wilayah negara lain paling jauh tiga mil dari garis pantai teritorial negara pesisir lainnya.

B. Saran-Saran

1. Dalam rangka menciptakan sebuah rejim, prinsip-prinsip, dan norma serta peraturan dan prosedur dalam rangka menjawab tantangan keamanan maritim, diperlukan penyesuaian satu sama lain antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Membangun kerangka kerjasama baik secara politik maupun hukum yang komprehensif adalah elemen yang sangat signifikan untuk menciptakan keefektifan kerjasama di Selat Malaka, antara lain:
 - a. Secara ideal, negara-negara tersebut dapat mengikat daripada sebuah perjanjian sebagai dasar/payung kerjasama dan diimplementasikan dengan beberapa kerjasama teknis untuk menciptakan Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi wilayah yang aman dan kondusif.
 - b. Memformulasi kebijakan bersama yang dapat mencegah dan mengontrol serta menetralsir kegiatan kejahatan lintas Negara (*transnational crime*)